

## PENGARUH REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN FLORES TIMUR

**FAUZIYAH LAMAYA**

Staf pengajar pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Kupang – NTT  
Email: [fauziyahlamaya@gmail.com](mailto:fauziyahlamaya@gmail.com)

**NURAINI NONA MEI**

Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Kupang – NTT  
[Nuraini90@gmail.com](mailto:Nuraini90@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Flores Timur, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur. Analisis Data menggunakan teknik Analisis Statistik Inferensial untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan alat analisis menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $t_{hitung0.05} 3,444 > t_{tabel} 1,859$ ., maka sesuai analisis *coeficients*, secara parsial keputusan yang diambil adalah Pendapatan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Daerah Kabupaten Flores Timur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa  $t_{hitung0.05} 3,539 > t_{tabel} 3.444$ ., maka sesuai analisis *coeficients*, secara parsial keputusan yang diambil adalah Belanja daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, hasil uji sumultan menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel} \alpha 0,05$  dengan derajat bebas (df) pembilang 2 dan derajat bebas penyebut 7 didapat  $F_{tabel} 4,260$  . Dengan demikian maka  $F_{hitung} 8,187 > 4,260 F_{tabel}$  , maka sesuai analisis *coeficients*, secara simultan keputusan yang diambil pendapatan daerah dan Belanja daerah berpengaruh secara bersama – sama (simultan ) dan *signifikan* terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

***Kata Kunci : Pendapatan, Belanja dan Pertumbuhan***

### PENDAHULUAN

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah, maka itu analisis terhadap belanja seharusnya dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi dan koreksi. Belanja yang dilakukan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur pada realisasi anggaran

pendapatan dan belanja daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap pertumbuhan Ekonomi

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui pengaruh pendapatan daerah terhadap, pertumbuhan ekonomi di kabupaten Flores Timur, menganalisis dan mengetahui pengaruh Pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur dan menganalisis dan mengetahui pengaruh Pengeharian pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lainlain yang sah (Nurcholis. 2007: 182). Menurut Mardiasmo (2011: 1), " Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah: Menurut Halim QAl2: 101) : "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daera. Menurut Halim (2012 101) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah. Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:
  1. Pajak hotel.
  2. Paiak restoran.
  3. Pajak hiburan.
  4. Pajak reklame.
  5. Pajak penerangan jalan.
  6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
  7. Pajak parkir.
- b. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan LJU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yanu Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah lang dipisahkan merupakan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

- d. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah. Selain yang disebut di atas, Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan., Pendapatan denda pajak., Pendapatan denda retribusi, Pendapatan eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian., Fasilitas social dan umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

#### **Dana Transfer**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004). Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Transfer pengertian dana transfer adalah "dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (1), DBH terdiri atas Pajak dan Sumber Daya Alam : Sumber-sumber penerimaan DBH adalah Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH yang bersumber dari pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan pasal 25129 dan 21. Sementara DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam meliputi kehutanan, pertambangan umum perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (2), besaran dana bagi hasil adalah sebagai berikut : Besaran dana bagi hasil penerimaan Negara dari PBB dengan imbalan 10% untuk daerah. Besaran dana bagi hasil penerimaan Negara dari BPHTB dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah Dana bagi Hasil pajak penghasilan pasal 25129 dan 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%. Sementara itu, dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU Neto, ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan dalam Negeri Menurut Saragih (2003: 98). Kebijakan DAU merupakan instrument penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (horizontal fiscal imbalance). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer) berfungsi sebagai factor pemerataan fiskal antara daerah-daerah untuk mempersekecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan daerah

#### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian DAK adalah : "dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional". Kegiatan khusus yang

dimaksud yaitu :Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umlrm dan/atau Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas Nasional

### **Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan pasal I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD adalah merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Pem'akilan Raky'at Daerah (DPRD).

Selain melaksanakan hak-haknva. pemerintah daerah .iuga memiliki kewaj iban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada pihak public kepentingan publik. Kewajiban- kew,aiiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Untuk melaksanakan ker'ajibn- kewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran- pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kerva- liban - kewaiiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Abdul Halim (2002:73) mengemukakan bahwa "Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau teriadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Kemudian bahwa belanja daerah dalam bentuk belanja modal adalah belanja untuk investasi, berikut diterangkan sbb: "Menurut Sukirno (2006) dalam Sayekti Sundiyah (2009; 482) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan ker.vajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannva kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 31 ayat (1). merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Halim (2012: 10) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetu.iui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Menurut Badrudin (2012: 97) :APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten. dan kota daiam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun vaigr dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah. Menurut Mardiasmo QAI2:103) APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya. anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluara. membantu pengambilan keputusan dan perencanarin pembangunan. Otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan dating. sumber pengembangan ukuranukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. " Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). dan ditetapkan dengan peraturan daerah

### **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau dalam perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sukirno, 2006;10).

### **METODE PENELITIAN**

Analisis Data menggunakan teknik Analisis Statistik Inferensial untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan alat analisis menggunakan Regresi Linier Berganda melalui bantuan program SPSS 19. Formulasinya sebagai berikut :  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji parsial  $t_{hitung0.05} 3,444 > t_{tabel} 1,859$ ., maka sesuai analisis koefisien, secara parsial keputusan yang diambil adalah hipotesis  $H_a$  diterima artinya Pendapatan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Daerah Kabupaten Flores Timur. Keputusan lain yang perlu diambil berdasarkan data tabel di atas adalah bahwa pada kolom sig (significance) untuk Pendapatan Daerah, menunjukkan nilai sebesar 0,009 atau probabilitasnya berada dibawah 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian koefisien regresi signifikan atau dengan kata lain variabel Pendapatan Daerah benar – benar berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Daerah Kabupaten Flores Timur

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel} \alpha 0,05$  dengan derajat bebas (df) pembilang 2 dan derajat bebas penyebut 7 didapat  $F_{tabel} 4,260$ . Dengan demikian maka  $F_{hitung} 8,18 > 4,260 F_{tabel}$ , maka sesuai analisis koefisien, secara simultan keputusan yang diambil adalah hipotesis  $H_a$  diterima artinya variabel pendapatan daerah dan Belanja daerah berpengaruh secara bersama – sama dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Keputusan lain yang diambil berdasarkan perhitungan di atas adalah bahwa pada kolom sig (significance) sebesar 0,002 atau probabilitasnya berada dibawah 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian koefisien regresi signifikan.

Hasil penelitian ini mendukung dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Jeval Kisra tahun 2014 yakni pendapatan daerah dan belanja daerah baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian

temuan ini memperkuat dan menjadi sebuah teori bahwa pendapatan daerah dan belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan daerah

#### KESIMPULAN

1. Pendapatan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Selain itu koefisien regresi juga dinilai *signifikan* atau dengan kata lain pendapatan daerah benar – benar berpengaruh secara *signifikan* terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur
2. Belanja Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur. Selain itu koefisien regresi juga dinilai *signifikan* atau dengan kata lain Belanja daerah benar – benar berpengaruh secara *signifikan* terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur.
3. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerahl berpengaruh secara bersama – sama (simultan ) dan *signifikan* terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur.

#### SARAN

1. Disarankan agar pemerintah daerah kabupaten Flores Timur mengalokasikan belanja daerah minimal sama atau lebih besar agar dapat di lakukan belanja untuk pembangunan pada daerah -daerah menjadi lebih baik dari belanja tahun sebelumnya
2. Disarankan agar pemerintah daerah kabupaten Flores Timur nrelakukan maksimalisasi penerimaan daerah seperti pajak daerah sehingga penerimaan tetap berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Ramla. 2014. Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
- Budiono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, edisi 1, bpfe, Jogjakarta, 1994
- Irafahmi, Diana Tien. 2009. Studi Komparasi Pengukuran Kinerja Finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Blitar. *Modernisasi* 5 (2): 82-91.
- JURNAL MANAJEMEN & BISNIS VOL 11 NO. 01 APRIL 2011 ISSN 1693-7619 42.
- Mamesah. 1995. *Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta: erlangga
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Principles Of Economics Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- M.P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga*, edisi 4, Erlangga, Jakarta.
- Rahmi, Aulia. 2006. *Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang*. (Skripsi). Semarang. Universitas Diponegoro
- Rasul, Sjahruddin. 2008. Akuntabilitas Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi* XII (3): 324-338.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rudiningtyas D.A. (2012). Pengaruh Pendapatan dan Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran (Studi Pada APBN 2004-2008). Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang (UNISMA).

Subchan & Sudarman. 2011. *Pengaruh Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. (Jurnal). Semarang Universitas Diponegoro

Setiyati. (2007). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja Pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Fakultas Ekonomi Trunojoyo.